

SKRIPSI

**ANALISIS ANGGARAN BENCANA:
STUDI KASUS KABUPATEN
DAN KOTA SE- SULAWESI SELATAN**



**YORIANI MELINA
1810321125**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS ANGGARAN BENCANA: STUDI KASUS KABUPATEN DAN KOTA SE- SULAWESI SELATAN



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi S1 Akuntansi

**YORIANI MELINA
1810321125**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**ANALISIS ANGGARAN BENCANA:
STUDI KASUS KABUPATEN
DAN KOTA SE-SULAWESI SELATAN**

Disusun Dan Diajukan Oleh

**YORIANI MELINA
1810321125**

telah diperiksa dan diuji
Pada tanggal 20 Maret 2023

Pembimbing,



Dr.Habib Muhammad Shahib, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,ACPA.,CSRS.,CSRA..CLI

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**



PRODI AKUNTANSI

Yasmi,S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,ACPA

NIDN : 0925107801

SKRIPSI

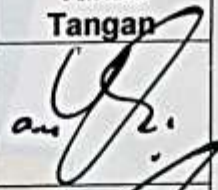
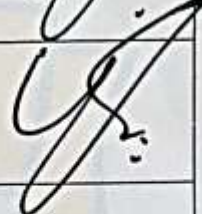
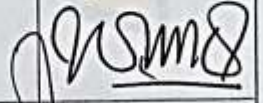

ANALISIS ANGGARAN BENCANA: STUDI KASUS KABUPATEN DAN KOTA SE-SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

YORIANI MELINA
1810321125

Telah diperiksa untuk diuji
pada tanggal 20 Maret 2023

Menyatakan,
Dewan penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Habib Muhammad Sahib, SE., M.Si.,Ak.,CA.,ACPA.,CSRS.CSRA.,CLI	Ketua	
2	Yasmi, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,ACPA	Sekretaris	
3	Wawan Darmawan, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,ACPA	Anggota	
4	Dr. Mulyadi Hamid. SE.,M.Si.	Eksternal	

Dekan Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


OR. FAKULTAS
ILMU SOSIAL

Dr. Yusmahizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN : 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar




PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN : 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Yoriani Melina

Nim : 1810321125

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Anggaran Bencana studi kasus Kabupaten dan Kota Se Sulawesi Selatan adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 08 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Yoriani Melina

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Analisis Anggaran Bencana studi kasus Kabupaten dan Kota se Sulawesi Selatan ”. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan ilmu-ilmu sosial Jurusan Akuntansi Universitas Fajar Makassar.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, dukungan, nasehat, dan bantuan lain baik secara moral maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua ayah Markus Taru’, ayah sambung Donding dan ibu Dina Lisubua’. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak Dr. Habib Muhammad Shahib, S.E.,M.Si.,CA.,ACPA.,CSRS.,CSRA.,CLI selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.

1. Rektor Universitas Fajar Bapak Dr.Muliyadi Hamid, S.E.,M.Si,
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.,
3. Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar Ibu Yasmi,S.E.,M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA,
4. Diri sendiri, karena telah mampu bertahan dan sampai pada tahap ini,
5. Untuk orang tua saya, Markus Taru’,ayah sambung saya Donding, dan Ibu saya Dina Lisubua’ yang selalu memberikan kasih sayang,doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah

hidup penulis yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup, penulis berharap dapat menjadi anak yang dibanggakan,

6. Kakak-kakak saya Yoyaki, Mikael, Nova, Narti dan adik-adik saya Regina, Handika yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat untuk penulis,
7. Keluarga yang selalu mendukung penulis dalam menyusun skripsi.
8. Sahabat dan teman sekamar saya Andi Putri Rahayu Melyani dan Rofiah Ijas Taufik yang selalu memberikan semangat dari awal hingga akhir penulisan skripsi,
9. Sahabat saya selama di bangku perkuliahan Willian Sari, Wila Susila, Muhammad Idrus, Rede Ala', Nurul Hidayah dan Nega Sandang,
10. Seluruh teman-teman seperjuangan dimasa kuliah yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

ABSTRAK

ANALISIS ANGGARAN BENCANA: STUDI KASUS KABUPATEN DAN KOTA SE-SULAWESI SELATAN

Yoriani Melina

Habib Muhammad Sahib

Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana analisis anggaran bencana Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses situs <https://dibi.bnpb.go.id/xdibidibi.bnpb.go.id> mulai dari tanggal 10 juni 2022 sampai agustus 2022. Adapun sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampling sebanyak 24 terdiri dari 21 kabupaten 3 kota. Adapun teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen berupa laporan jumlah bencana dan laoran realisasi anggaran bencana mulai pada tahun 2017-2021. Metode analisis data yang digunakan Program Ms. Excel dan Microsoftword.

Kata kunci : Jumlah Bencana, Realisasi Anggaran Bencana

ABSTRACT

DISASTER BUDGET ANALYSIS CASE : STUDIES OF DISTRICTS AND SITIES IN SOUTH SULAWESI SELATAN

Yoriani Melina

Habib Muhammad Sahib

The purpose of this study was conducted with the aim to be achieved is to find out how to analyze district and city disaster budgets in South Sulawesi Province. This research was conducted by accessing the site <https://dibi.bnpb.go.id/xdibidibi.bnpb.go.id> starting from June 10, 2022 to August 2022. The sample used in this study was purposive sampling with a number of sampling. as many as 24 consisting of 21 districts and 3 cities. The data collection technique is by collecting documents in the form of reports on the number of disasters and reports on the realization of the disaster budget starting in 2017-2021. The data analysis method used by the Ms. Excel and Microsoft Word.

Keywords : *Number of Disasters, Realization of Disaster Budget*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	16
DAFTAR GAMBAR.....	30
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	5
1.4.2 Kegunaan praktis.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Karakteristik Dan Fungsi Anggaran Pemerintah.....	6
2.1.1 Karakteristik Anggaran Pemerintah Daerah	6
2.2 Fungsi Anggaran Pemerintah	8
2.3 Isu Lingkungan Dan Anggaran.....	10
2.3.1 Regulasi Yang Tumpang Tindih	12

2.3.2 Kesadaran Politis Mengenai Isu Iklim	14
2.3.3 Rendahnya Pengetahuan Mengenai Isu Lingkungan Dan Iklim....	14
2.4 Kajian Anggaran Bencana	16
2.4.1 Kajian Penelitian Terdahulu	16
2.5 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Rancangan Penelitian.....	20
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	21
3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian	21
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.6 Instrumen Penelitian	22
3.7 Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum	25
4.2 Hasil Penelitian.....	27
4.3 Pembahasan.....	64
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	68
Daftar Pustaka.....	69
Lampiran	70

Daftar tabel

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Tabel Jumlah Bencana dan Anggaran Bencana	24

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Gambar Grafi Kabupaten Bulukumba.....	32
Gambar 4.2 Gambar Grafi Kabupaten Jeneponto.....	33
Gambar 4.3 Gambar Grafi Kbupaten Takalar	44
Gambar 4.4 Gambar Grafi Kabupaten Gowa	34
Gambar 4.5 Gambar Grafi Kabupaten Bantaeng	35
Gambar 4.6 GTambar Grafi Kabupaten Enrekang	37
Gambar 4.7 Gambar Grafi Kabupaten Selayar	38
Gambar 4.8 Gambar Grafi Kabupaten Sinjai.....	39
Gambar 4.9 Kambar Grafi Kabupaten Maros.....	40
Gambar 4.10 Gambar Grafi Kabupaten Pangkajene	42
Gambar 4.11 Gambar Grafi Kabupaten Barru.....	43
Gambar 4.12 Gambar Grafi Kabupaten Bone	44
Gambar 4.13 GambarGrafi Kabupaten Soppeng	46
Gambar 4.14 Gambar Grafik Kabupaten Wajo	47
Gambar 4.15 Gambar Grafi kabupaten Sidrap.....	49
Gambar 4.16 Gambar grafi kabupaten Pinrang	51
Gambar 4.17 Gambar grafi kabupaten Luwu	52
Gambar 4.18 Gambar grafi kabupaten Tana Toraja.....	54
Gambar 4.19 Gambar grafi kabupaten Toraja Utara	55
Gambar 4.20 Gambar Grafi Kabupaten Luwu Utara	56
Gambar 4.21 Gambar Grafi Kabupaten Luwu Timur.....	58
Gambar 4.22 Gambar Grafi Kota Pare-Pare	59
Gambar 4.23 Gambar Grafi Kota Makassar.....	61
Gambar 4.24 Gambar Grafi Kota Palopo	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks karena terdiri dari pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Juga merupakan daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam dan non alam. Pada tahun 2020 BNPB, melakukan kajian tentang kondisi kebencanaan di Indonesia dan menyusunnya dalam bentuk indeks rawan bencana Indonesia (IRBI). Data IRBI BNPB tersebut menunjukkan bahwa Provinsi di Sulawesi Selatan mempunyai indeks resiko bencana tertinggi ke-VI Potensi bencana di Sulawesi Selatan yang relatif tinggi baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak dari kerusakan/kerugian yang ditimbulkan dengan skor 160,05 dari 34 provinsi di Indonesia.

Namun Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung parah dan memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya.

Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun sumber daya hutan

di Indonesia cenderung semakin parah, sementara itu perusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana.

Hal tersebut cukup mebebani keuangan Negara dan Daerah, hal itu dapat dibuktikan melalui *talkshow* secara daring bertajuk asuransi barang milik Negara sebagai langkah pengamatan aset Negara yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Keuangan (BPPK). Dalam pemaparannya direktur BMN menjelaskan bahwa rata – rata kerugian pertahun akibat bencana pada tahun 2016-2020 adalah Rp. 22,8 triliun sedangkan rata-rata dana kontingensi tahunan pada tahun 2016-2020 sebesar Rp. 3,1 triliun. Dari data itu terlihat kesenjangan pembiayaan antara nilai kerugian dan dana kontingensi sebesar Rp. 19,75 triliun. “oleh karena itu, kita mengasuransikan BMN,”.

Beberapa penelitian terdahulu, telah mengkaji isu bencana meskipun belum banyak yang berfokus pada analisis penganggaran kebencanaan. Yang merupakan suatu hal yang menaraik untuk di angkat dari isu soal pengelolaan penganggaran bencana alam jika dilihat dari sudut pandnag akuntansi. Dalam debat akuntansi banyak cara untuk mengelola anggaran bencana dari penelitian-penelitian berbagai Negara di dunia. Hal ini kemudian menjadi daya tarik penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang analisis anggaran bencana kabupaten dan kota se- Sulaweswi Selatan.

Sebagai contoh penelitian dari, Barbara Lynch (2009) yang mengeksplorasi tentang pelaporan lingkungan di pemerintahan Australia, jadi hasil analisis yang disajikan dalam penelitian tersebut adalah pengungkapan lingkungan yang dikembangkan dengan menggunakan indeks pengungkapan yang meningkat dari tahun dari tahun 2001 hingga tahun 2008.

Kemudian dalam penelitian Noor Cholis Majid (2018) membahas tentang penghitungan kerugian akibat bencana belum memberikan hasil yang akurat. Beberapa perhitungan yang dilakukan menetapkan angka dua atau tiga kali lebih besar dari hasil perhitungan akhir. Fenomena hasil akhir tersebut selain disebabkan oleh sulitnya perhitungan kerugian akibat bencana alam juga karena adanya kesenjangan untuk memaksimalkan bantuan penanggulangan bencana alam dari pemerintah pusat.

Kesulitan yang dihadapi dalam menghitung bencana alam tidak hanya terletak pada kompleksitas faktor-faktor yang akan dihitung, tetapi juga sejauh mana kerusakan akibat bencana alam diperhitungkan. Dalam menentukan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan kerusakan akibat bencana alam harus menghitung kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana alam dan biaya sebagai akibat bencana alam. Selain itu ada juga kerusakan langsung dan tidak langsung dari bencana alam yang semuanya harus dihitung seteliti mungkin.

Selanjutnya penelitian dari che ku Kassim, che ku Hisan, Surya Ahmad, Noor Emilina Mohd Nasir, (2019), dalam penelitian ini mengkaji laporan Environmental (ER) pemerintah Malaysia dan secara khusus membahas tentang motivasi dan alasan mendasar mengenai kurangnya pengungkapan dalam berbagai media. Dalam studi tersebut menemukan bahwa motivasi utama pemerintah Malaysia untuk memberikan informasi lingkungan tanpa persyaratan peraturan adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan legalitas.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, menarik untuk melihat bagaimana metode atau pola penganggaran bencana di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kembali ke konteks

anggaran peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana anggaran bencana diimplementasikan oleh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan anggaran penanggulangan bencana juga efektif untuk penanggulangan bencana tidak terduga tergantung pada situasinya, terutama dalam kaitannya dengan Indonesia yang disebut sebagai Negara rawan bencana.

Berdasarkan fenomena yang dibahas sebelumnya, peneliti juga tertarik untuk meneliti bagaimana anggaran penanggulangan bencana alam di kabupaten dan kota se- Sulawesi Selatan. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang bagaimana anggaran bencana Provinsi diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya membantu mencapai tujuan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis anggaran penanggulangan bencana Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana analisis anggaran bencana Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan informasi “pola analisis penganggaran penanggulangan bencana alam” di pemerintahan dan menambah wawasan bagi para pembaca.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur-literatur pemerintah mengenai pola penganggaran bencana dalam,

a. Bagi Peneliti

Penelitian dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang pentingnya pola analisis penganggaran penanggulangan bencana alam kabupaten/kota di seluruh Sulawesi selatan

b. Bagi Pemerintah Daerah, Kota dan Provinsi

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan keputusan dalam penganggaran penanggulangan bencana, dan dapat mengetahui apakah besarnya bencana yang terjadi akan semakin besar pula penganggarnya atau sebaliknya.

c. Bagi Universitas

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pemerintah daerah maupun kota di Sulawesi selatan khususnya bagi Akuntansi dalam pola analisis penganggaran penanggulangan bencana alam yang terjadi guna untuk mengembangkan lebih luas tujuan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristi dan Fungsi Anggaran Pemerintah

Menurut pendapat Mardiasmo (2009:67), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukurnan finansial.

Sedangkan menurut Abdul Hafiz Tanjung (2006:81) didalam bukunya yang berjudul Akuntansi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Karakteristik dan fungsi anggaran pemerintah yaitu :

Menurut Indra Bastian (2010:191) karakteristik anggaran adalah :

1. Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan;
2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu , yaitu satu atau beberapa tahun;
3. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan atau manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
4. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran;
5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan buku Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan Asia (*the Asia Foundation*) dari *Asian Development Bank* (ADB) pada awal tahun 2006, dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerah diperlukan pemahaman awal tentang "Karakteristik Anggaran" pemerintah daerah yang mencakup antara lain: siapa-siapa saja pelaku kunci (*key person*) yang terlibat; siklus dan kalender anggaran; dan rincian proses anggaran yang merupakan siklus selama 30 (tigapuluh) bulan atau dua setengah tahun. Karakteristik anggaran pemerintah yang dapat dicermati adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran pemerintah harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin Anggaran

Anggaran yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi penganggaran.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam pemerintah.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan masyarakat.

5. Disusun Dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran pemerintah disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait..

2.2 Fungsi Anggaran Pemerintah

Undang-undang keuangan Negara tahun 2002 menjelaskan Anggaran Pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan yang fungsi utamanya untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Dalam anggaran pemerintah tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Berikut fungsi anggaran pemerintah dan penjelasannya:

Menurut Rudianto (2013:5) fungsi anggaran pemerintah meliputi beberapa hal antaralain:

1. Perencanaan (*planning*, anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam bertindak yang diupayakan untuk direalisasikan, memberi saran dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi dalam suatu periode tertentu,
2. Pengorganisasian (*organizing*) setelah semua rencana ditetapkan mak pemerintah daerah mencari sumberdaya yang dibutuhkan untuk meralisasikan rencana yang ditetapkan
3. Menggerakkan (*actuating*) setiap sumber daya rencana yang ada harus diarahkan, dikoordinasikan satu dengan yang lainnya agar dapat bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi.
4. Pengendalian (*controlling*) anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak.

Sedangkan menurut peraturan Menteri dalam Negeri no. 13 Tahun 2006 tentang pedomanpenganggaran Pemerintah Daerah menyebutkan beberapa fungsi anggaran pemerintah yaitu :

1. Fungsi Anggaran pemerintah sebagai Otorisasi
Fungsi anggaran pemerintah adalah sebagai dasar untuk merealisasikan anggaran bencana pada tahun yang direncanakan. Jika tidak dianggarkan dalam fungsi anggaran pemerintah, maka sebuah kegiatan tidak memiliki dasar untuk dilaksanakan.
2. Fungsi Anggaran Pemerintah sebagai Perencanaan
Adalah dibuat sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan suatu daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

3. Fungsi Anggaran Pemerintah sebagai Pengawasan

Adalah sebagai pedoman penyelenggaraan anggaran penanggulangan dan fungsi Anggaran pemerintah daerah adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan anggaran.

4. Fungsi Anggaran Pemerintah sebagai Alokasi

Anggaran yang tercantum dalam anggaran pemerintah harus digunakan untuk penyediaan fasilitas publik. Lebih jelas, anggaran pemerintah digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan bersama.

a. Fungsi BPBD sebagai Distribus

Kebijakan dalam fungsi BPBD baik penganggaran, pendapatan, maupun belanja digunakan untuk semua pihak, bukan hanya terfokus satu sektor atau daerah saja, serta harus menjunjung asas keadilan.

b. Fungsi BPBD sebagai Stabilisasi

Fungsi APBD adalah sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan ekonomi daerah.

2.3 Isu Lingkungan

Lingkungan hidup menjadi kajian ilmu pengetahuan diawali dari ahli seorang biologi bernama Ernest Haeckel (1860), Ernest Haeckel memperkenalkan istilah lingkungan hidup atau ekologi. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos berarti rumah dan logos berarti ilmu. Berawal dari konsep ekologi mendorong beberapa ahli untuk lebih memperdalam konsep tentang lingkungan.

Menurut Emil Salim (1860:21) lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita

tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Yang jika disederhanakan ruang lingkup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi dan social

Sedangkan menurut soedjono (1860:12) lingkungan adalah fisik natau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.

Jadi Peran pemerintah daerah dalam sektor lingkungan hidup sangat penting, terlebih dengan semakin tingginya kejadian bencana alam yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti banjir dan tanah longsor. Dalam sistem desentralisasi tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup merupakan salah satu sektor yang sebagian kewenangan pengelolaannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda).

Namun, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada 2021, empat dari tujuh daerah yang menjadi objek studi - yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Cirebon, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Sigi - belum memiliki peraturan daerah (perda) atau peraturan khusus untuk program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim oleh pemda masih belum optimal karena banyaknya tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program. Setidaknya, pemda menghadapi empat tantangan utama yaitu administratif, finansial, politis, dan pengetahuan teknis yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Peraturan Yang Tumpang Tindih

Pemerintah daerah berhadapan dengan sanggahan administratif karena belum adanya peraturan yang mengikat dan adanya tumpang tindih birokrasi yang menghambat kinerja dalam menjalankan program terkait lingkungan dan perubahan iklim. Pembagian kewenangan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, regulasi tersebut belum memuat aturan pembagian kewenangan secara spesifik mengenai perubahan iklim. Di Provinsi Kalimantan Utara, misalnya, pembagian peran yang kurang jelas antar pemangku kepentingan - seperti kurangnya sinkronisasi data dalam pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi - menjadi hambatan dalam pencapaian target lingkungan. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang sudah memiliki perda khusus mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perda tersebut mencakup aturan mengenai pembagian kewenangan, koordinasi, evaluasi, hingga pendanaan. Mengingat pentingnya peran aktif pemda dalam merumuskan kebijakan terkait perubahan iklim, adanya perda khusus sebagai arahan bagi otoritas provinsi maupun kabupaten/kota, serta bagi para pemangku kepentingan di daerah, menjadi sangat krusial dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi dan meningkatkan ketahanan daerah. Tantangan berikutnya adalah tantangan finansial.

Anggaran lingkungan hidup bertujuan untuk membiayai berbagai program yang berorientasi pada lingkungan dan mitigasi perubahan iklim di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seperti program pembangunan hijau maupun program konservasi. Sayangnya, dari segi alokasi,

anggaran yang dimaksud masih memiliki proporsi yang sangat kecil dibanding dengan pos belanja lainnya, seperti layanan umum dan pendidikan.

Hal ini membuat rencana dan program pengentasan isu lingkungan menjadi terbatas. Padahal, banyak masalah lingkungan dan perubahan iklim yang secara langsung berdampak bagi kehidupan masyarakat, seperti bencana kekeringan dan banjir. Selain alokasi anggaran yang kecil, pemda juga masih bergantung pada tunjangan dari pemerintah pusat. Adanya guncangan pada anggaran pemerintah pusat secara langsung akan berdampak pada alokasi ke daerah. Akibatnya, usaha pengentasan masalah lingkungan dan perubahan iklim oleh pemda menjadi semakin terhambat.

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu contoh nyata. Anggaran pemerintah pusat dan daerah difokuskan untuk penanganan masalah kesehatan sehingga terjadi realokasi di pos belanja lain, termasuk pada belanja fungsi lingkungan hidup. Terakhir, pemda juga menghadapi kurangnya sumber pendanaan potensial berbentuk pendanaan publik maupun pinjaman. Sebabnya, pendanaan dan investasi di bidang lingkungan hidup terlihat kurang menguntungkan secara ekonomi dibanding dengan investasi di bidang lain seperti pembangunan infrastruktur, meskipun pada dasarnya pendanaan program lingkungan dan iklim memiliki manfaat sosial yang besar. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memperkirakan kerugian ekonomi nasional yang ditimbulkan akibat dampak perubahan iklim dapat mencapai Rp 115 triliun pada 2024. Jika pemda fokus dalam mencari dan meningkatkan pendanaan iklim dan lingkungan hidup, kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan dan bencana akibat perubahan iklim dapat dihindarkan.

2.3.2 Kesadaran politis mengenai isu iklim

Dalam menjalankan programnya, pemda juga dihadapkan pada tantangan politis, seperti rendahnya kesadaran para pemangku kepentingan akan masalah lingkungan dan perubahan iklim. Akibatnya, program perlindungan lingkungan hidup serta pengendalian perubahan iklim tidak menjadi isu strategis dalam RPJMD. Tidak hanya itu, adanya konflik kepentingan juga menjadi salah satu penyebab program tersebut tidak menjadi program unggulan. Pemimpin daerah yang mendapat keuntungan dari kegiatan bisnis yang menghasilkan emisi tinggi menjadi contoh nyata dari isu konflik kepentingan. Masalah politik lainnya yang menjadi tantangan adalah kebijakan pemda yang mengikuti siklus periode pemimpin daerah. Periode kepemimpinan yang hanya lima tahun menyebabkan pemda berfokus pada permasalahan dasar seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Permasalahan lingkungan dan pengendalian iklim kerap diabaikan. Kebijakan seperti pengenaan retribusi untuk pengelolaan sampah atau kebijakan perbaikan lahan kritis, yang hasilnya baru dapat dinikmati pada jangka panjang (lebih dari lima tahun), dianggap sebagai kebijakan yang tidak populis dan dapat mengurangi elektabilitas politik pada pemilu selanjutnya. Walaupun kepala daerah menerapkan kebijakan perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim, kebijakan bisa terhenti apabila terjadi pergantian kepemimpinan.

2.3.3 Rendahnya pengetahuan mengenai isu lingkungan dan iklim

Tantangan terakhir adalah tantangan teknis pada saat menjalankan program lingkungan dan pengendalian iklim. Isu yang paling sering dihadapi ialah ketidaksetaraan pemahaman mengenai risiko iklim antar pemangku kepentingan

daerah. Perbedaan pandangan menyebabkan tidak selarasnya perencanaan program- program yang berkaitan dengan isu tersebut. Selain itu, perencanaan yang matang sulit tercapai karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang terkait. Pada beberapa daerah seperti Kabupaten Sigi (Provinsi Sulawesi Tengah), Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Kalimantan Utara, pemda masih kekurangan personel yang paham mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Hal ini disebabkan belum banyaknya program pelatihan maupun pendidikan dalam rangka peningkatan kapasitas dalam bidang tersebut. Sosialisasi terstruktur dari pemerintah pusat juga masih sangat terbatas, sehingga pemda belum melihat urgensi dari program lingkungan dan pengendalian iklim. Oleh karena itu, sering kali pendanaan untuk program lingkungan masih dilihat sebagai pembiayaan, bukan sebagai investasi.

2.3.4 Langkah yang bisa dilakukan ke depan

Upaya untuk mengatasi berbagai tantangan di atas dapat dimulai dari memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penanganan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Upaya ini harus didukung oleh regulasi di tingkat nasional yang mengikat masing-masing pihak, agar permasalahan lingkungan dapat menjadi salah satu isu prioritas di tingkat daerah dan mendapatkan alokasi anggaran yang memadai.

Permasalahan lingkungan hidup harus segera diatasi melalui perbaikan kebijakan pembangunan daerah, karena jika terus dibiarkan akan berdampak negatif bagi arah pembangunan lokal ke depannya. Dengan demikian, pemda harus mampu mendesain agenda dan strategi pembangunan yang berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan terukur. Selain itu, pemda juga perlu mengurangi ketergantungan finansial dari pemerintah pusat dengan cara

mencari sumber pendanaan dari pihak ketiga untuk program lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah. Kajian anggaran bencana yaitu:

2.4 Kajian Peneliti Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk melakukan penelitian ini:

Nama penulis (Tahun)	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Temuan penelitian	kesimpulan	Saran peneliti
Barbar A Lyncy (2009)	Untuk memberikan tinjauan perbandingan pelaporan lingkungan pemerintah Australia	Metode penelitian ini menggunakan Indeks Pengungkapan Lingkungan digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan penelitian ini.	Temuan dalam Penelitian ini yaitu mengikuti analisis tren dalam praktik pengungkapan dan perbandingan pelaporan tahunan tiap pemerintah Australia	Kesimpulan penelitian ini adalah	Saran dalam penelitian ini adalah

<p>Noor Cholis Majid (2018)</p>	<p>Tujuan penelitian ini yaitu berfokus pada data anggaran tanggap darurat bencana, belum mencakup pada pemulihan akibat bencana</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan kajian literatur dan kerangka Konseptual pemikiran secara logis.</p>	<p>Penghitungan kerugian bencana alam yang belum akurat, kesulitan menghitung kerugian akibat bencana alam, periode perbaikan setelah bencana</p>	<p>Penghitungan bencana yang belum akurat dan kesulitan dalam perhitungan kerugian setelah bencana</p>	<p>Penelitian ini menyaran agar penelitian ini dilanjutkan dengan studi lapangan ke tiap daerah yang mengalami bencana agar penelitian ini dapat dikaji dengan lengkap.</p>
---------------------------------	--	---	---	--	---

che ku Kassim, che ku Hisan, Surya Ahmad, Noor Emilina Mohd Nasir, (2019)	Tujuan Penelitian ini Yaitu untuk Menguji praktik pelaporan lingkungan (ER) di pemerintah daerah Malaysia	Metode penelitian ini menggunakan kajian literatur Sebelumnya Tentang pengungkapan sosial dan lingkungan yang dibuat oleh sektor publik (PSO).	Temuan hasilnya menunjukkan bahwa mempertahankan atau meningkatkan letimigasi lingkungan adalah pendorong utama bagi pemda malaysia untuk memeberikan pengungkapan lingkungan tanpa adanya persyaratan dan peraturan.	Kesimpulan Nya yaitu praktik pelaporan lingkungan pemda Malaysia menyadari kurangnya pelaporan pengungkapan lingkungan dalam berbagai media pelaporan	Penelitian ini memberikan pemahaman baru bahwa setiap perubahan kebijakan yang dapat lebih meningkatkan tingkat dan kualitas pengungkap an lingkungan yang dibuat oleh pemda.
---	---	---	---	--	---

Dilihat dari ketiga penelitian diatas,dapat diartikan bahwa pemahaman mengenai anggaran sebagai sumber untuk penganggaran bencana sangatlah luas pengertiannya. Maka dari itu,peneliti mencoba untuk mengkaji mengenai analisis penganggran kebencanaan dalam pengalokasian anggaran bencana di kabupaten,kota, provinsi sesulawesi selatan. Bagaimana. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan,ini merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan penelitian terhadapnya.

2.5 Kerangka Pikir Penelitian

Selanjutnya, kerangka berpikir penelitian ini yaitu:

Gambar 2.1 kerangka berpikir



Sumber data : diolah 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode kuantitatif yaitu penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui setiap situs sampel penelitian, menggunakan prosedur-prosedur statistik yang digunakan untuk mengukur analisis data yang bersifat kuantitatif.

Menurut Viandita (013:116). dimana penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang memperjelas atau mengklasifikasi hubungan antara dua atau lebih aspek situasi atau fenomena. Sebaiknya sebelum melakukan penelitian perlu menguraikan dengan jelas bahwa rancangan yang bersifat kualitatif memang benar-benar sesuai dengan tujuan umum penelitian.

Selanjutnya, pandangan menurut V. Wiratna sujarweni (2014:39) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang dapat dicapai (peroleh) dengan menggunakan prosedur- prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Dan diantara beberapa defenisi diatas, Sugiyono (2017;8) kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Pada penelitian proposal ini, peneliti akan memakai metode penelitian kuantitatif menggunakan prosedur-prosedur statistik, yang digunakan untuk mengukur analisis data yang bersifat kuantitatif.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di akses pada situs <https://dibi.bnppb.go.id/xdibidibi.bnppb.go.id> dan dari masing-masing situs kabupaten/kota mulai dari tanggal 10 juni 2022 sampai agustus 2022.

3.3. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi sulawesi selatan selama periode tahun 2017-2021 dengan total 21 kabupaten dan 3 kota diantaranya kabupaten Bantaeng, Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, Takalar, Tana Toraja, Toraja Utara, Wajo, dan kota diantaranya yaitu kota Makassar, Pare-Pare, dan Kota Palopo. Adapun sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana penentuan sample nantinya ditetapkan oleh kriteria-kriteria tertentu.

Adapun kriteria pemilihan sample dalam penelitian ini adalah:

1. Seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi sulawesi selatan periode 2017-2021 dengan data yang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini
2. Laporan realisasi anggaran yang diterbitkan secara berturut-turut pada tahun 2017-2021.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat langsung diukur atau dihitung, berupa informasi atau interpretasi dalam bentuk numerik (Sugiyono 2019).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Namun berdasarkan data antara yang tersedia berupa dokumen atau data laporan realisasi anggaran bencana periode 2017-20221 yang tercatat di BNPB. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber yaitu Situs BNPB (<https://dibi.bnpb.go.id/xdibidibi.bnpb.go.id>) dan situs masing-masing kabupate/kota .

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian ini, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data. Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa setting, sumber dan metode observasi, wawancara, dokumen atau literatur, atau kombinasi dari semuanya (Sugiyono, 2016).

Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen berupa laporan jumlah bencana dan laoran realisasi anggaran bencana mulai pada tahun 2017-2021.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat dan fitur yang digunakan oleh peneliti selama proses pengumpulan data untuk memudahkan pekerjaan dan melakukan penelitian dengan hasil yang lebih akurat, lebih lengkap, dan lebih konsisten, Memungkinkan pemrosesan. Alat bantu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pelaporan tahunan Realisasi anggaran bencana khususnya pada kabupaten dan kota di sulawesi selatan.

3.7 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan Program Ms. Excel dan Microsoftword.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Sedangkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Jadi dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran bencana adalah suatu kegiatan yang dapat diukur dnegan satuan uang untuk pencapaian efisiensi dan efektivitas dari dampak bencana yang terjadi.

4.1.1 Penetapan Anggaran Bencana Pemerintah Daerah

Mekanisme pendanaan baik dari Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana harus disesuaikan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu meliputi tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Pada tahap prabencana pemerintah menggunakan dana kontijensi yang dianggarkan dalam APBN dan dana lain melalui anggaran APBN atau APBD. Pada saat tanggap darurat pemerintah dan pemerintah daerah

menggunakan dana siap pakai. Dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD), dan pemerintah daerah juga dapat menggunakan dana siap pakai dalam APBD yang ditetapkan dalam anggaran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Sedangkan untuk tahap pascabencana, pemerintah menyediakan dana bantuan sosial berupa hibah dana darurat. Kedua dana tersebut bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

Tolak ukur anggaran bencana harus memperhatikan tertib administrasi dan akuntabilitas. Inspektur Utama BNPB, Drs. Bintang Susmanto, Ak., MBA mengatakan dana siap pakai (DSP) digunakan pada Masa tanggap darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketersediaan dana segera, namun tetap menjaga akuntabilitasnya. Penggunaan anggaran dapat melakukan penunjukan langsung dalam penanggulangan bencana, asalkan pada masa keadaan darurat. Disertai surat pernyataan keadaan tanggap darurat dari kepala daerah seperti bupati atau gubernur.

Dana penanggulangan bencana terbagi dalam tiga kategori. Pertama, dana kontijensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana. Kedua, dana siap pakai disediakan dalam APBN yang disiapkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada tahap keadaan darurat. Selain itu pemerintah dapat menyediakan DSP yang berasal dari APBD. Dana siap pakai harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat. Ketiga, dana bantuan sosial berupa hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.

Terkait dengan hal ini maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 mengenai pendanaan dan pengelolaan dana penanggulangan bencana yang didalam pasal 32 menyatakan bahwa

pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, dan pada pasal 36 menyatakan bahwa semua laporan pertanggung jawaban penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan perundang-undangan.

4.2 Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini peneliti melakukan analisis dengan mengakses situs <https://dibi.bnpb.go.id/xdibidibi.bnpb.go.id> adapun informasi yang peneliti dapatkan yaitu dengan cara mengambil data anggaran bencana dan jumlah anggaran bencana di Sulawesi selatan yaitu 21 kabupaten dan 3 kota. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan dari provinsi Sulawesi selatan yang dianalisis selama periode lima tahun, dimulai pada tahun 2017 – 2021.

Berikut dibawah ini merupakan tabel analisis anggaran bencana dari provinsi Sulawesi selatan di 21 kabupaten dan 3 kota:

TABEL 4.1
Anggaran dan Jumlah Bencana

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN	JUMLAH BENCANA	ANGGARAN BENCANA
1	BULUKUMBA	2021	2	15,057,700,000
		2020	6	700,584,205
		2019	2	189,350,000
		2018	22	1,339,160,000
		2017	3	810,576,400
2	JENEPONTO	2021	3	1,796,600,000
		2020	2	100,000,000
		2019	4	345,800,000
		2018	1	

				100,000,000
		2017	3	108,000,000
3	TAKALAR	2021	0	1,511,736,004
		2020	5	1,118,731,000
		2019	7	1,021,257,951
		2018	26	2,500,000,000
		2017	2	3,057,826,947
4	GOWA	2021	1	360,128,609
		2020	2	500,000,000
		2019	3	892,490,000
		2018	2	886,344,530
		2017	1	2,000,000,000
5	BANTAENG	2021	1	305,826,947
		2020	4	176,284,000
		2019	1	234,171,672
		2018	0	1,100,000,000
		2017	0	300,000,000
6	ENREKANG	2021	0	230,400,000
		2020	5	200,000,000
		2019	12	6,739,393,000
		2018	4	244,340,000
		2017	0	1,869,392,000
7	KEPULAUAN SELAYAR	2021	0	749,985,000
		2020	1	2,008,897,680
		2019	2	
		2018	17	
		2017	0	
8	SINNJAI	2021	2	
		2020	7	

				1,000,000,000
		2019	7	590,175,000
		2018	2	423,740,000
		2017	1	863,445,309
9	MAROS	2021	0	6,706,807,000
		2020	4	2,000,408,971
		2019	1	622,200,000
		2018	3	708,450,000
		2017	3	148,902,465
10	PANGKAJENE KEPULAUAN	2021	0	1,376,922,526
		2020	10	5,005,200,000
		2019	6	411,014,000
		2018	4	963,616,000
		2017	6	23,417,167,200
11	BARRU	2021	0	35,871,900,000
		2020	7	200,408,971
		2019	9	10,092,372,374
		2018	4	9,180,269,886
		2017	8	10,827,100,000
12	BONE	2021	1	8,924,900,000
		2020	7	304,032,000
		2019	5	1,001,971,450
		2018	3	1,002,240,000
		2017	2	108,727,271
13	SOPPENG	2021	0	12,713,422,686
		2020	1	200,539,161
		2019	5	443,613,000
		2018	17	400,037,000
		2017	1	

				11,757,551,961
14	WAJO	2021	11	1,859,000,000
		2020	14	1,636,899,000
		2019	13	1,478,283,000
		2018	12	1,924,268,000
		2017	11	7,500,000,000
15	SIDENRENG RAPPANG	2021	1	15,821,303,480
		2020	12	500,000,000
		2019	14	2,352,483,000
		2018	17	1,632,560,000
		2017	4	17,000,000,000
16	PINRANG	2021	4	8,242,302,000
		2020	17	1,000,000,000
		2019	5	340,482,000
		2018	1	298,800,000
		2017	4	500,740,600
17	LUWU	2021	2	10,469,400,000
		2020	8	3,000,000,000
		2019	6	480,161,000
		2018	3	600,269,000
		2017	4	4,555,659,050
18	TANA TORAJA	2021	0	38,992,600,250
		2020	22	1,497,002,000
		2019	40	1,356,800,000
		2018	13	1,302,937,000
		2017	6	125,552,044,750
19	TORAJA UTARA	2021	0	213,741,000,000
		2020	3	100,500,000
		2019	40	3,330,285,000

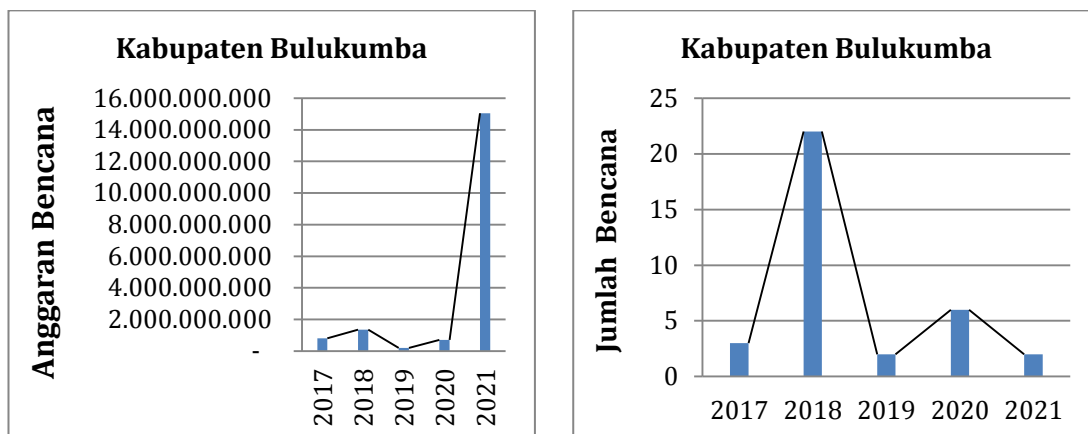
		2018	10	1,894,200,000
		2017	1	1,542,500,000
20	LUWU UTARA	2021	5	611,030,252,000
		2020	9	300,000,000
		2019	21	489,600,000
		2018	3	170,224,000
		2017	6	19,221,700,000
		2021	3	2,668,408,050,155
		2020	9	500,000,000
21	LUWU TIMUR	2019	2	1,714,350,169,000
		2018	2	682,411,000
		2017	3	2,478,605,275,000
		2021	0	1,748,525,642
		2020	4	1,000,000,000
22	KOTA PARE-PARE	2019	0	77,000,000,000
		2018	0	205,868,000,000
		2017	1	2,567,448,800,000
		2021	1	9,180,269,886,000
		2020	2	300,283,889,000
23	KOTA MAKASSAR	2019	1	240,000,000,000
		2018	1	120,000,000,000
		2017	1	2,384,069,400,649
		2021	1	200,889,786,000
		2020	4	35,871,900,000
24	KOTA PALOPO	2019	2	1,300,688,000
		2018	2	16,259,675,684
		2017	0	231,528,564,387

Sumber; <https://dibi.bn timer.go.id/xdibidibi.bn timer.go.id>

Analisis isi laporan tahunan pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan ini menggunakan perbandingan dari lima (5) tahun berturut-turut laporan Anggaran bencana. Secara keseluruhan laporan anggaran bencana dari 21 kabupaten dan 3 kota pada periode tahun 2021 terus terjadi peningkatan yang signifikan selama periode waktu yang di periksa.

Dari Tabel 4.1 membuktikan dari anggaran dan jumlah bencana di provinsi Sulawesi Selatan diketahui bahwa rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 6 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 200.913.947.498. dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 100.000.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 40 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 9.180.269.886.000. Adapun analisis anggaran setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

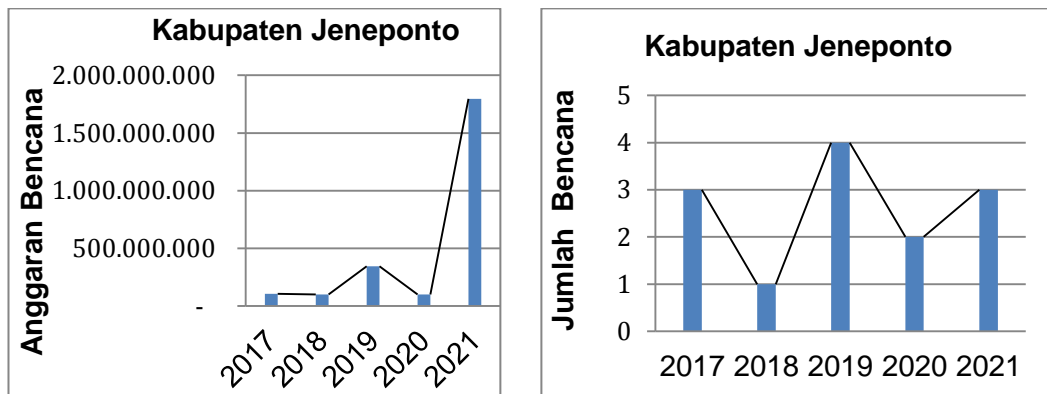
Grafik 4.1



Dari Grafik 4.1 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di kabupaten Bulukumba diketahui sebanyak 35 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 18.097.370.605, dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 7 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 3.619.474.121 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 2, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 189.350.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 22 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 15.057.700.000.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 18.097.370.605 dengan persentase bencana secara 5 tahun berturut-turut yaitu banjir terjadi sebanyak 6 kali dalam 5 tahun, tanah longsor 2 kali, abrasi pantai 2 kali, dan kekeringan 3 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 15.057.700.000 daripada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tahun 2018 bencana sebesar 22 bencana sedangkan anggaran hanya sebesar Rp 1,339,160,000. Ini membuktikan bahwa diperlukannya pengevaluasian anggaran berdasarkan bencana yang terjadi, apakah anggaran dari tahun 2017 mengalami peningkatan atau penurunan sampai pada tahun 2021.

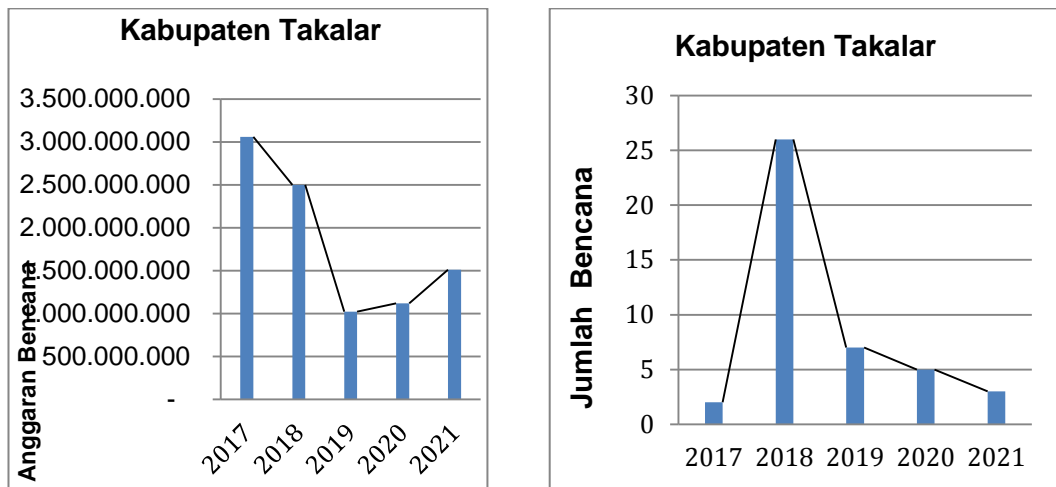
Grafik 4.2



Dari Grafik 4.2 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Jeneponto diketahui sebanyak 33 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp2.450.400.000, dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 3 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 490.080.000 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 1, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 100.000.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 4 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 1.796.600.000.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 2.450.400.000 dengan persentase bencana yang terjadi secara 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 3 kali, tanah longsor 2 kali, dan kekeringan 2 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,796,600,000 daripada tahun-tahun sebelumnya yang hanya memiliki rata-rata 100 milyar sampai 300 milyar saja, dengan rentan bencana yang sama dengan tahun 2021 yaitu 1%-4% bencana dan ini juga membuktikan perlunya pengevaluasian atau peninjauan di Kabupaten Jeneponto terhadap bencana yang terjadi agar anggaran pada setiap bencana yang terjadi dapat di realisasikan sesuai bencana yang terjadi apakah pada tahun tersebut meningkat atau menurun.

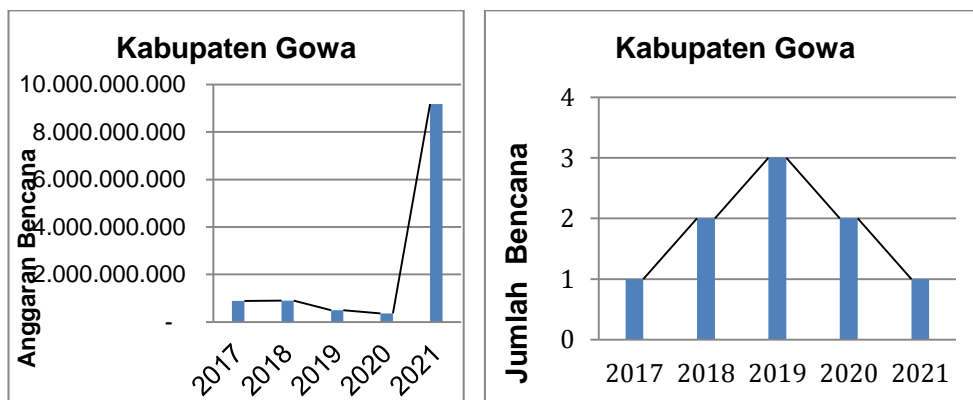
Grafik 4.3



Dari Grafik 4.3 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Takalar diketahui sebanyak 40 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 18.389.821.788, dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 8 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 1.841.910.380 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 1.021.257.951 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 26 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 3.057.826.947.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran di Kabupaten Takalar dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 18.389.821.788 dengan persentase bencana yang terjadi yaitu banjir 1 kali, abrasi 2 kali. Dan dapat dilihat pada tahun 2018 jumlah bencana yang mencapai 26% memiliki anggaran yang tidak relevan dengan jumlah bencana yang terjadi, maka dari data ini membuktikan perlunya pengevaluasian realisasi Anggaran di kabupaten Takalar karena bencana yang terjadi tidak relevan dengan anggaran yang direalisasikan.

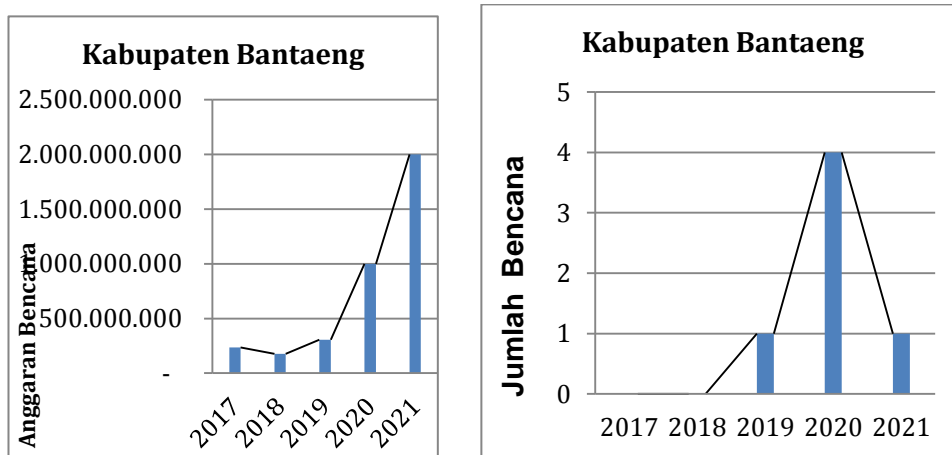
Grafik 4.4



Dari Grafik 4.4 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Gowa diketahui sebanyak 9 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp11.819.233.025, dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 2 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 2.363.846.605 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 1, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 360.128.609 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 3 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 9.180.269.886.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 11.819.233.025 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 2 kali, tanah longsor 1 kali. Dan pada data menunjukkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 9,180,269,886 daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan rentan bencana yang sama dengan tahun 2021 yaitu 1%-3% bencana dan ini juga membuktikan perlunya pengevaluasian atau peninjauan di Kabupaten Gowa terhadap bencana yang terjadi agar anggaran pada setiap bencana yang terjadi dapat di realisasikan sesuai bencana yang terjadi agar anggaran bencana dapat terealisasi dengan tepat.

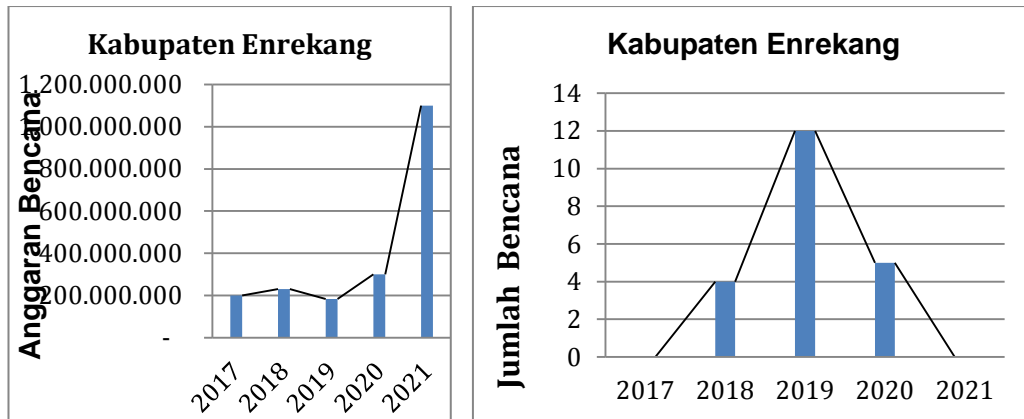
Grafik 4.5



Dari Grafik 4.5 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Bantaeng diketahui sebanyak 6 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 3.716.282.619, dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 2 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 743.256.524 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 176.284.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 4 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 2.000.000.000.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 3.716.282.619 dengan persentase bencana yang terjadi secara 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 1 kali, tanah longsor 2 kali, kekeringan 1 kali. Dan data pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,000,000,000 - 2,000,000,000 dari pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat di kabupaten Bantaeng tahun 2020 dan 2021 memiliki bencana yang berbeda tetapi pada tahun 2021 peningkatan anggaran bencana yang tidak relevan dengan jumlah anggarannya. Ini membuktikan perlunya pengevaluasian yang baik agar anggaran yang direalisasikan untuk setiap bencana sesuai.

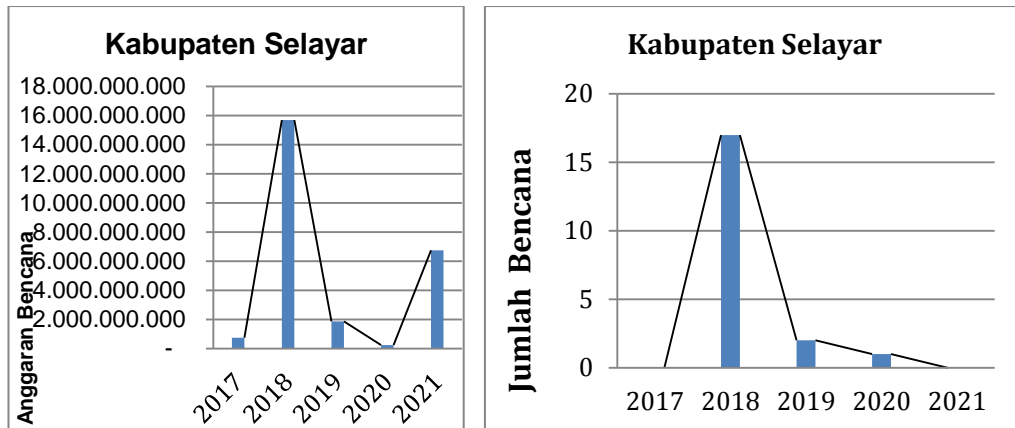
Grafik 4.6



Dari Grafik 4.6 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Enrekang diketahui sebanyak 21 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 2.013.844.000, dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 4 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 402.768.800 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 183.444.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 12 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 1.100.000.000.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 2.013.844.000 dengan persentase bencana yang terjadi selama 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 4 kali, tanah longsor 5 kali dan kebakaran hutan dan lahan 6 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 1,100,000,000 daripada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tahun 2019 terjadi sebesar 12 bencana sedangkan anggaran hanya sebesar Rp 183,444,000. Ini membuktikan bahwa diperlukannya pengevaluasian anggaran berdasarkan bencana yang terjadi, apakah anggaran dari tahun 2017 mengalami peningkatan atau penurunan sampai pada tahun 2021.

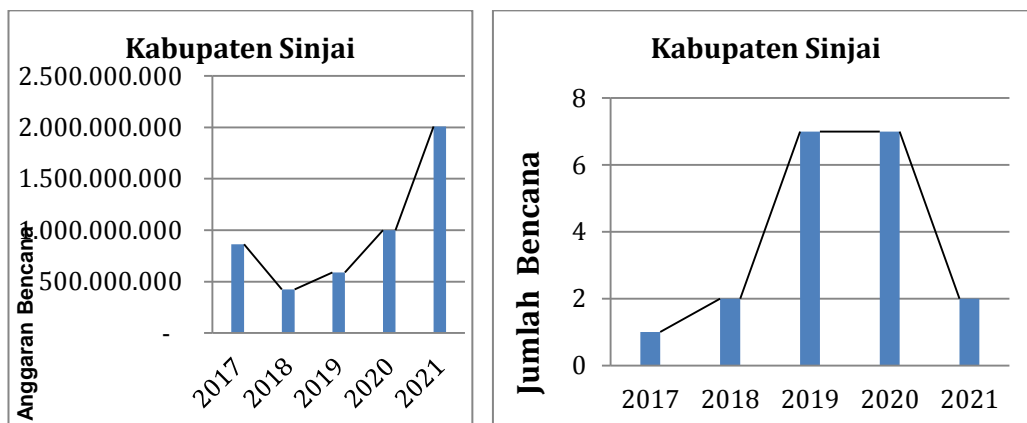
Grafik 4.7



Dari Grafik 4.7 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Selayar diketahui sebanyak 20 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 25.291.710.000, dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 4 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 5.058.342.000 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 244.340.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 17 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 15.688.600.000.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 25.291.710.000 dengan persentase bencana yang terjadi selama 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 1 kali, tanah longsor 1 kali, dan abrasi pantai 2 kali. di kabupaten Selayar ini membuktikan bahwa realisasi anggaran bencana sudah mencapai efektivitas dan tujuan anggaran bencana dengan jumlah bencana yang terjadi dapat dibuktikan pada tahun 2018 yang terjadi berjumlah 17 bencana dengan anggaran bencana senilai Rp 15,688,600,000.

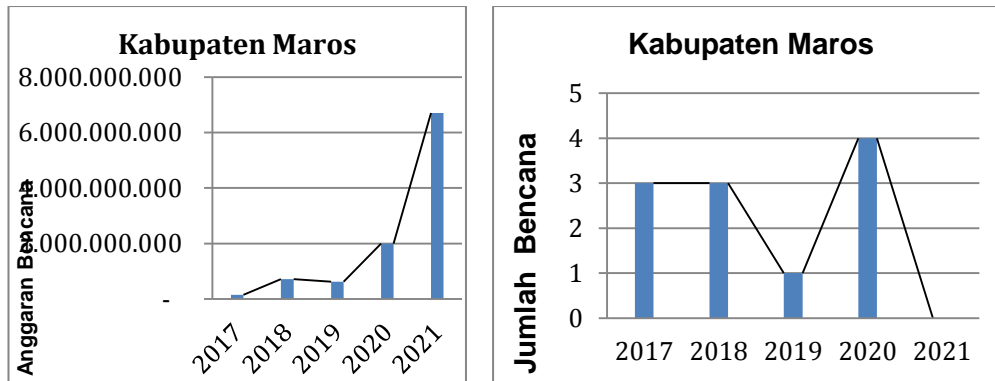
Grafik 4.8



Dari Grafik 4.8 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Sinjai diketahui sebanyak 19 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 4.886.257.989, dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 4 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 977.251.598 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 1, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 423.740.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 7 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 2.008.897.680.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 4.886.257.989 dengan persentase bencana yang terjadi selama 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 2 kali, tanah longsor dan 3 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 2,008,897,680 daripada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat perbandingan bencana antara 2021 dan tahun 2020 terjadi sebanyak 7 bencana sedangkan anggaran hanya sebesar Rp 1,000,000,000. Ini membuktikan bahwa diperlukannya pengevaluasian anggaran berdasarkan bencana yang terjadi, apakah anggaran dari tahun 2017 mengalami peningkatan atau penurunan sampai pada tahun 2021.

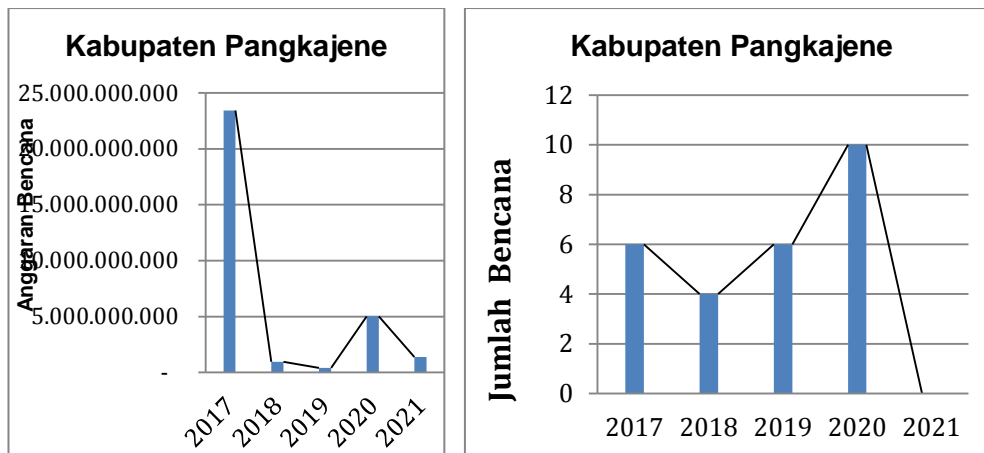
Grafik 4.9



Dari Grafik 4.9 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Maros diketahui sebanyak 11 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 10.186.768.436 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 2 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 2.037.353.687 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 148.902.465 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 4 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 6.706.807.000.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 10.186.768.436 dengan persentasi bencana yang terjadi selama 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 4 kali, tanah longsor 1 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 6,706,807,000 dengan persentase 0 bencana daripada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat perbandingan bencana antara 2021 dengan jumlah 0 bencana dan tahun 2020 terjadi sebanyak 4 bencana sedangkan anggaran hanya sebesar Rp 2,000,408,971. Ini membuktikan bahwa diperlukannya pengevaluasian anggaran berdasarkan bencana yang terjadi, apakah anggaran dari tahun 2017 mengalami peningkatan atau penurunan sampai pada tahun 2021.

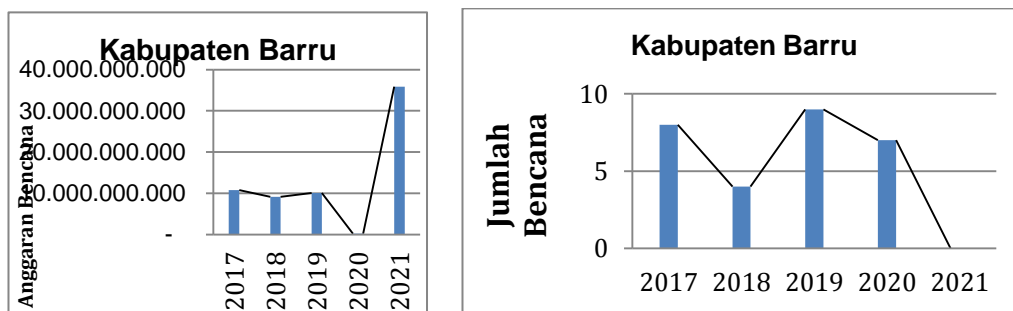
Grafik 4.10



Dari Grafik 4.10 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Pangkajene diketahui sebanyak 26 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 31.173.919.726 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 6 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 6.234.783.945 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 411.014.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 10 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 23.417.167.200.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 31.173.919.726 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 9 kali, tanah longsor 1 kali. pada kabupaten Pangkajene Kepulauan ini dapat dibandingkan dari tiap tahun dengan jumlah bencana dibuktikan bahwa anggaran bencana yang tidak relevan dengan jumlah bencana yang terjadi, karena besar kecilnya setiap bencana yang terjadi anggarannya tidak sesuai dengan efektivitas dan tujuan tercapainya anggaran bencana yang direalisasikan.

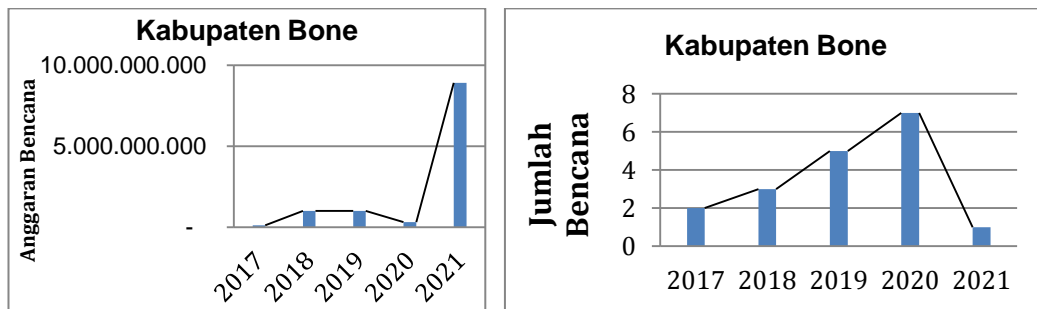
Grafik 4.11



Dari Grafik 4.11 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Barru diketahui sebanyak 28 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 66.172.051.231 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 6 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 13.234.410.246 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 200.408.971 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 9 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 35.871.900.000.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 66.172.051.231 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 10 kali, tanah longsor 2 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 35,871,900,000 dengan persentase 0 bencana daripada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat perbandingan bencana pada setiap tahun memiliki tingkat yang berbeda namun pada tahun 2021 dengan jumlah bencana yang terjadi sejumlah 0 bencana namun realisasi anggarannya sangat tidak relevan dengan bencana yang terjadi. ini membuktikan perlunya pengevaluasian dan peninjauan terhadap setiap anggaran dan bencana yang terjadi agar efektivitas penganggaran pemerintah dapat mencapai tujuan penganggaran yang sesuai.

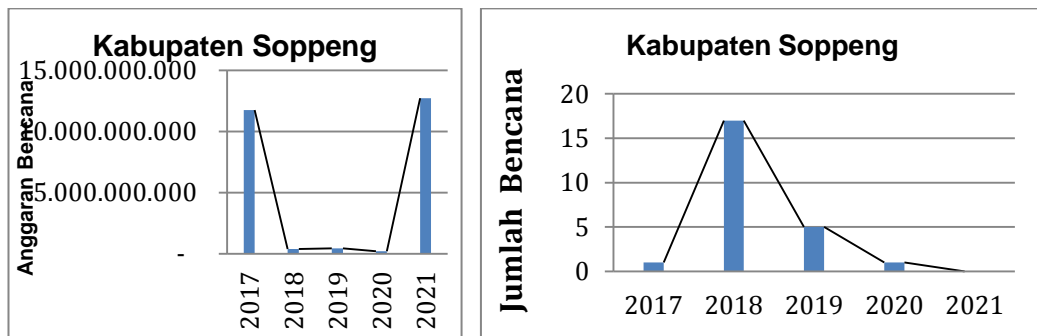
Grafik 4.12



Dari Grafik 4.12 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Bone diketahui sebanyak 18 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 11.341.870.721 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 4 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 2.268.374.144 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 1, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 108.727.271. serta jumlah bencana tertinggi sebesar 7 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 8.924.900.000.

Berdasarkan data di atas diketahui di Kabupaten Bone jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 11.341.870.721 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 5 kali, tanah longsor 2 kali. Dan pada tahun 2021 peningkatan anggaran sebesar Rp 8,924,900,000 dengan persentase bencana yang terjadi hanya 1 bencana, dapat dilihat perbandingan bencana yang terjadi pada setiap tahunnya memiliki tingkat yang berbeda tetapi pada tahun 2021 dengan jumlah bencana yang terjadi sejumlah 1 bencana namun realisasi anggarannya sangat tidak relevan dengan bencana yang terjadi. ini membuktikan perlunya pengevaluasian dan peninjauan terhadap setiap anggaran dan bencana yang terjadi agar efektivitas penganggaran pemerintah dapat mencapai tujuan penganggaran yang sesuai.

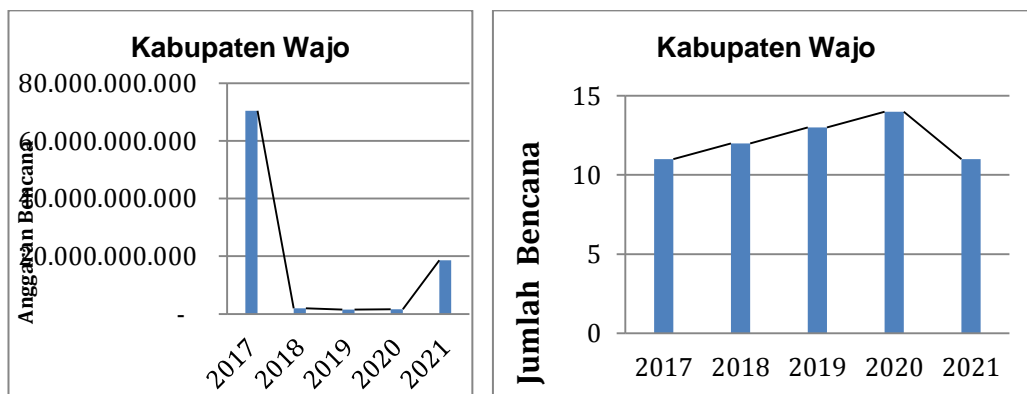
Grafik 4.13



Dari Grafik 4.13 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Soppeng diketahui sebanyak 24 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 25.515.163.808 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 5 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 5.103.032.762 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 200.539.161 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 17 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 12.713.422.686.

Berdasarkan data di atas diketahui di Kabupaten Soppeng jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 25.515.163.808 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 9 kali, tanah longsor 2 kali. Dan pada tahun 2017 dan 2021 peningkatan anggaran sebesar Rp 11,757,551,961- 12,713,422,686 dengan persentase bencana yang terjadi hanya 1:0 bencana, dapat dilihat perbandingan bencana yang terjadi pada tahun 2018 memiliki tingkat bencana yang lebih besar dari tahun 2017 dan 2021 tetapi pada tahun 2017 dan 2021 realisasi anggarannya sangat tidak relevan dengan bencana yang terjadi. ini membuktikan perlunya pengevaluasian dan peninjauan terhadap setiap anggaran dan bencana yang terjadi agar efektivitas penganggaran pemerintah dapat mencapai tujuan penganggaran yang sesuai.

Grafik 4.14

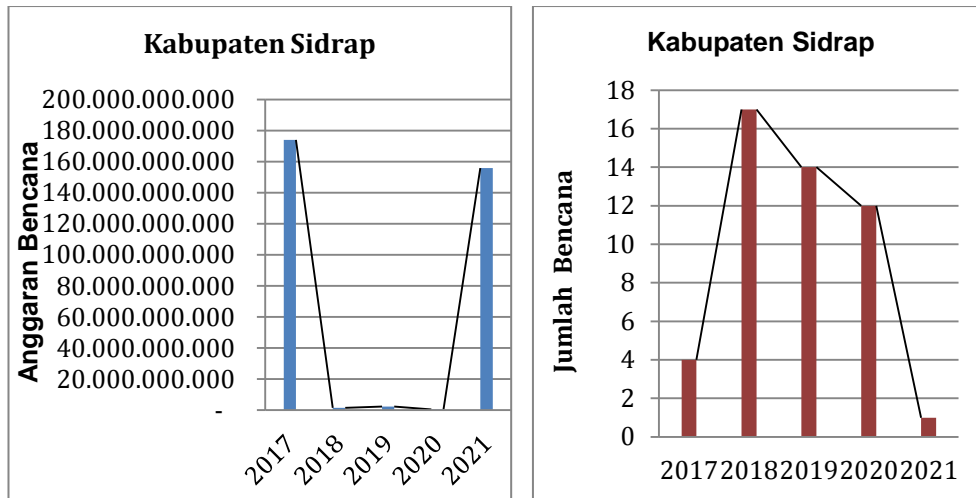


Dari Grafik 4.14 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Wajo diketahui sebanyak 61 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 14,398,450,000 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 12 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 2,879,690,000 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 11, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 1.478.283.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 14 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 7,500,000,000 .

Berdasarkan data di atas diketahui di Kabupaten Wajo jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 14,398,450,000 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 31 kali, tanah longsor 2 kali, abrasi 1 kali, kebakaran hutan dan lahan 1 kali. Dapat diketahui dari data jumlah bencana di kabupaten wajo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi dari data anggaran bendanya sangat tidak relevan karena pada tahun 2017 bendanya hanya 11 dan tahun berikutnya jumlah bencana meningkat, tetapi pada tahun 2017 anggarannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah bencana yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Ini membuktikan bahwa kurangnya pengevaluasian bencana dengan jumlah

anggaran, maka dari itu perlunya pengevaluasian atau peninjauan agar anggaran yang direalisasikan sesuai dengan efektivitas kinerja anggaran pemerintah daerah.

Grafik 4.15

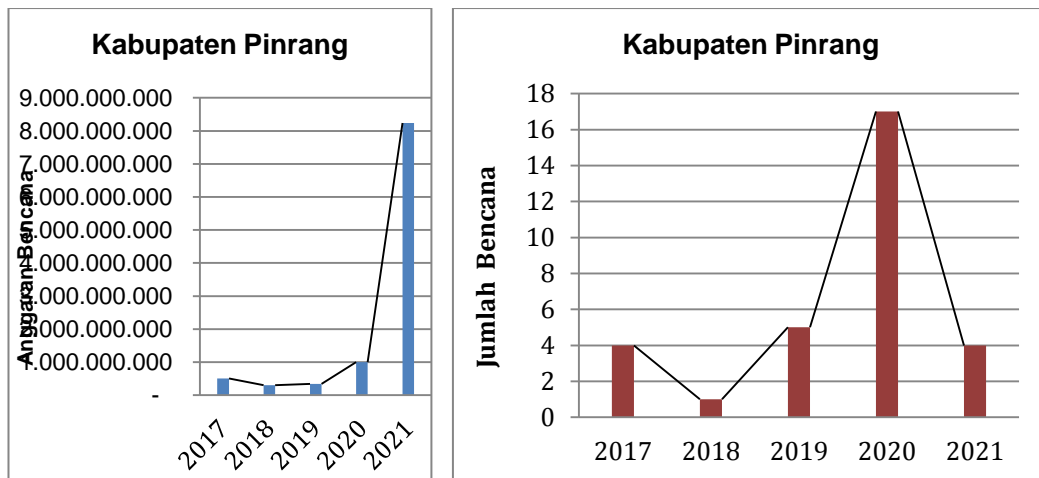


Dari Grafik 4.15 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Sidrap diketahui sebanyak 48 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 37,306,346,480 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 10 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 7,461,269,296 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 1, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 500.000.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 17 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 17,000,000,000.

Berdasarkan data di atas diketahui di Kabupaten Sidrap jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 37,306,346,480 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 19 kali, tanah longsor 1 kali. Dapat diketahui dari data jumlah bencana di kabupaten Sidrap mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan anggaran tetapi dari data anggaran bendanya sangat tidak relevan karena pada tahun 2021 bencana hanya 1 tetapi anggarannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah bencana yang terjadi

pada tahun-tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa kurangnya pengevaluasian bencana dengan jumlah anggaran, maka dari itu perlunya pengevaluasian atau peninjauan agar anggaran yang direalisasikan sesuai dengan efektivitas kinerja anggaran pemerintah daerah.

Grafik 4.16

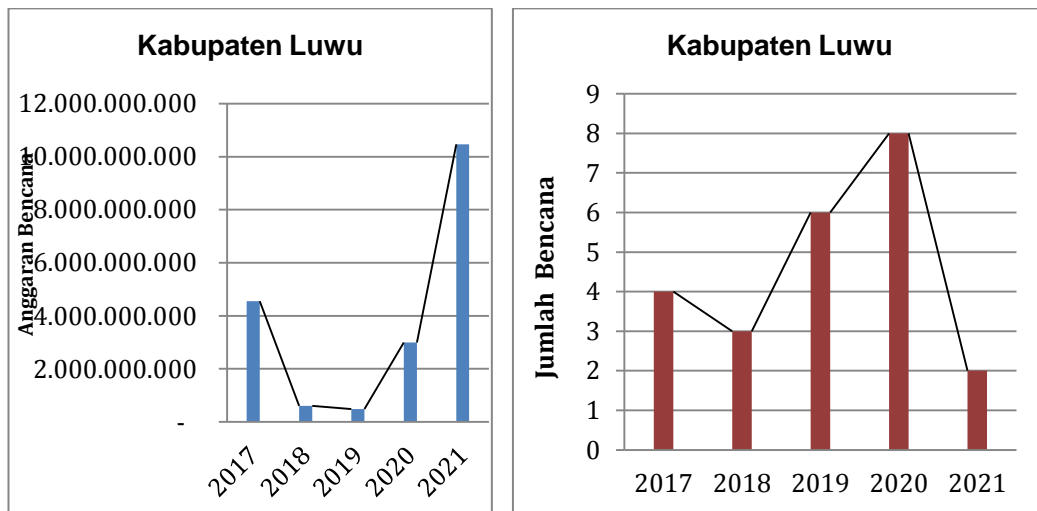


Dari Grafik 4.16 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Pinrang diketahui sebanyak 31 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 10.382.324.600 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 7 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 2.076.464.920 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 1, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 298.800.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 17 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 8.242.302.000.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 10.382.324.600 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 8 kali, tanah longsor 4 kali, abrasi 4 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 8.242.302.000 daripada tahun-tahun sebelumnya dapat, dengan rentan bencana yang sama dengan tahun 2017 yaitu 4% bencana dapat dilihat pada tahun 2020 bencanayang terjadi mencapai 17 bencana sedangkan anggaran bencana lebih rendah daripada tahun 2021, jadi ini juga membuktikan perlunya pengevaluasian

atau peninjaun di Kabupaten Pinrang terhadap bencana yang terjadi, agar anggaran pada setiap bencana yang terjadi dapat di realisasikan sesuai bencana yang terjadi apakah pada tahun tersebut meningkat atau menurun.

Grafik 4.17

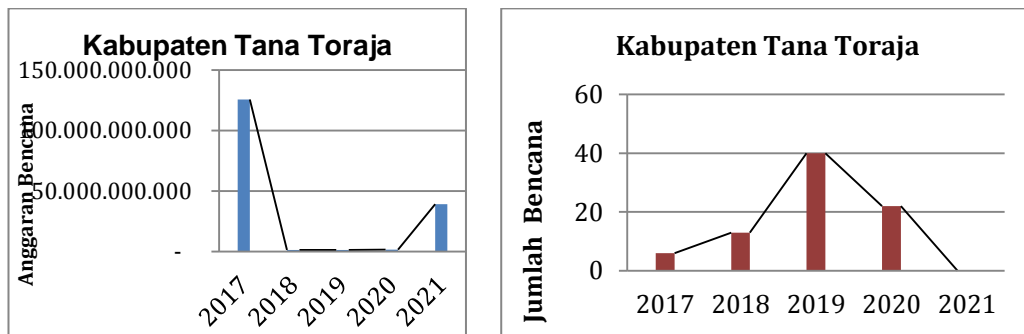


Dari Grafik 4.17 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Luwu diketahui sebanyak 23 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 19.105.489.050 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 5 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 3.821.097.810 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 2, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 480.161.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 8 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 10.469.400.000

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 19.105.489.050 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 21 kali, tanah longsor 2 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 10.469.400.000 daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan rentan bencana 2 sedangkan tahun 2020 8 bencana, dapat dilihat pada tahun 2020 bencana yang terjadi mencapai 8 bencana sedangkan anggaran bencana lebih rendah daripada tahun 2021, jadi ini juga membuktikan perlunya pengevaluasian atau peninjauan di Kabupaten

Pinrang terhadap bencana yang terjadi, agar anggaran pada setiap bencana yang terjadi dapat di realisasikan sesuai bencana yang terjadi apakah pada tahun tersebut meningkat atau menurun.

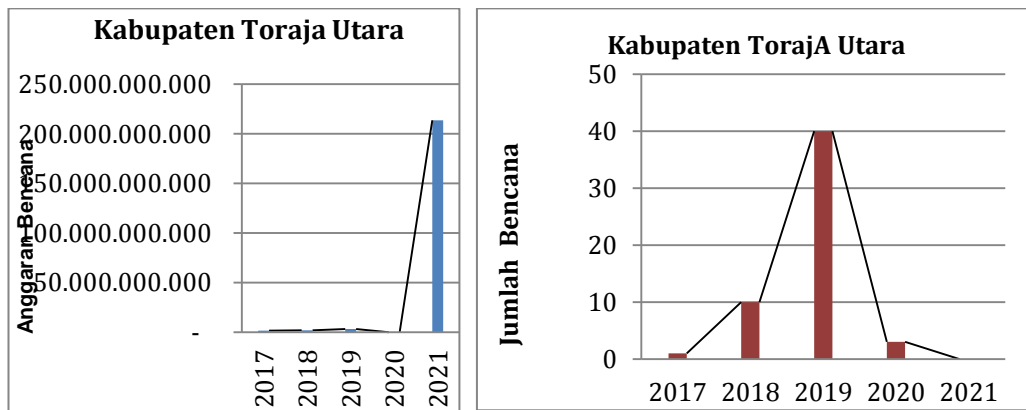
Grafik 4.18



Dari Grafik 4.18 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Tana Toraja diketahui sebanyak 81 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 68.701.384.000 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 17 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 33.740.276.800 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 1.302.937.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 40 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 25.552.044.750

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 68.701.384.000 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 5 kali, tanah longsor 40 kali, kebakaran hutan dan lahan 14 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 38,992,600,250 daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan rentan bencana 0 sedangkan tahun 2018-2020 tingkat bencana yang terjadi lebih tinggi dari tahun 2021, jadi ini juga membuktikan perlunya pengevaluasian atau peninjauan di Kabupaten Pinrang terhadap bencana yang terjadi, agar anggaran pada setiap bencana yang terjadi dapat di realisasikan sesuai bencana yang terjadi apakah pada tahun tersebut meningkat atau menurun.

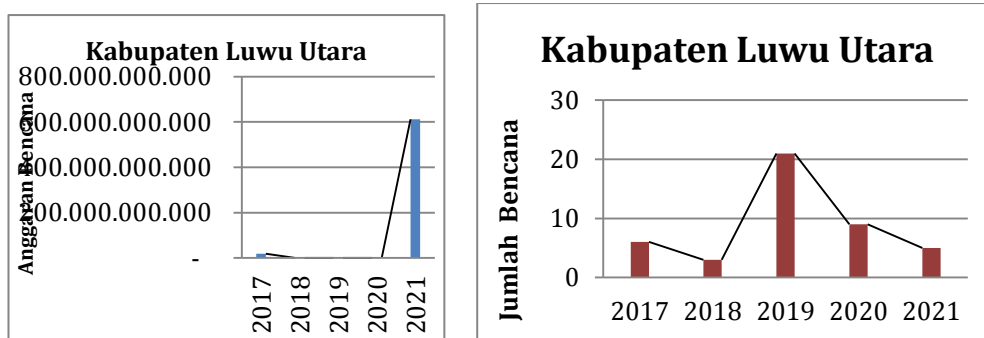
Grafik 4.19



Dari Grafik 4.19 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Toraja Utara diketahui sebanyak 54 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 20.608.485.000 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 11 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 44.212.697.000 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 100.500.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 40 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 13.741.000.000.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp20.608.485.000 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu tanah longsor 9 kali, kebakaran hutan dan lahan 5 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp13.741.000.000 daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan rentan bencana 0 sedangkan tahun 2018-2020 tingkat bencana yang terjadi lebih tinggi dari tahun 2021, jadi ini juga membuktikan perlunya pengevaluasian atau peninjauan di Kabupaten Pinrang terhadap bencana yang terjadi, agar anggaran pada setiap bencana yang terjadi dapat di realisasikan sesuai bencana yang terjadi apakah pada tahun tersebut meningkat atau menurun.

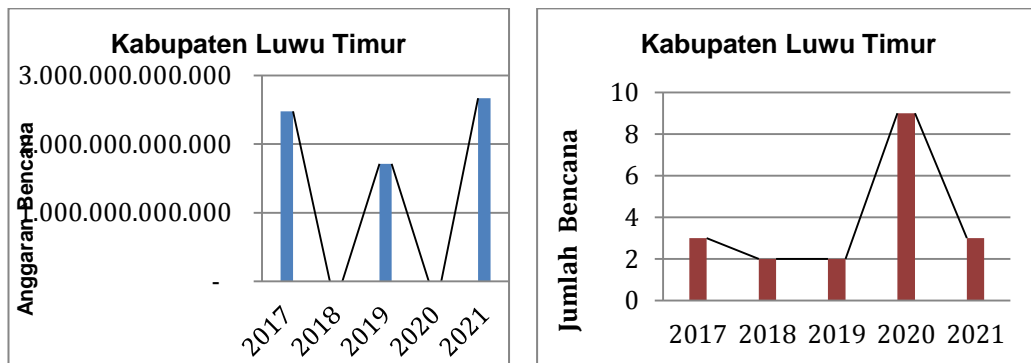
Grafik 4.20



Dari Grafik 4.20 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Luwu Utara diketahui sebanyak 44 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 631.211.776.000 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 9 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 126.242.355.200 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 3, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 170.224.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 21 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 611.030.252.000.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 631.211.776.000 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 15 kali, tanah longsor 3 kali, kebakaran hutan dan lahan 1 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 611.030.252.000 daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan rentan bencana 5 sedangkan tahun 2019 tingkat bencana yang terjadi lebih tinggi dari tahun 2021, jadi ini juga membuktikan perlunya pengevaluasian atau peninjauan di Kabupaten Pinrang terhadap bencana yang terjadi, agar anggaran pada setiap bencana yang terjadi dapat di realisasikan sesuai bencana yang terjadi apakah pada tahun tersebut meningkat atau menurun.

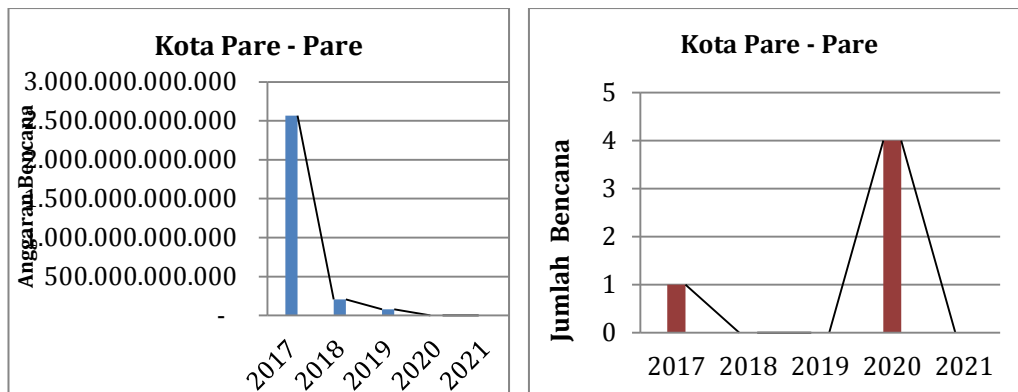
Grafik 4.21



Dari Grafik 4.21 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kabupaten Luwu Timur diketahui sebanyak 19 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 6.862.545.905.155 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 4 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 1.372.509.181.031 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 2, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 500.000.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 9 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 2.668.408.050.155.

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp6.862.545.905.155 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 11 kali, tanah longsor 7 kali, kebakaran hutan dan lahan 3 kali. dengan rentan bencana 3 sedangkan tahun 2020 tingkat bencana yang terjadi lebih tinggi dari tahun 2021 tetapi anggarannya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, jadi ini juga membuktikan perlunya peninjauan atau peninjauan di Kabupaten Luwu Timur terhadap bencana yang terjadi, agar anggaran pada setiap bencana yang terjadi dapat di realisasikan sesuai dengan bencana yang terjadi apakah pada tahun tersebut meningkat atau menurun.

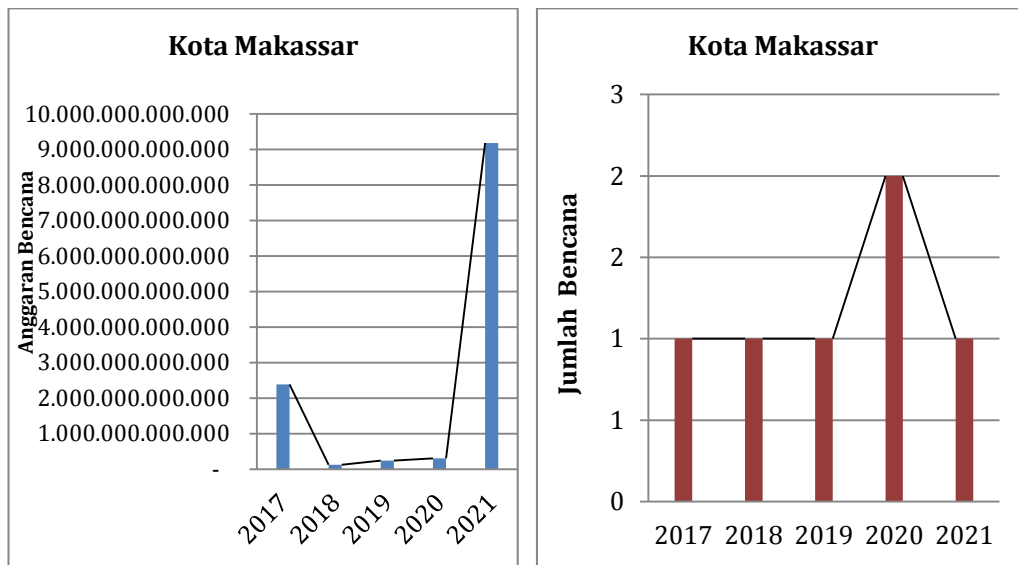
Grafik 4.22



Dari Grafik 4.22 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kota Pare-pare diketahui sebanyak 5 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 2.853.065.325.642 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 1 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 570.613.065.128 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 1.000.000.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 4 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 2.567.448.800

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 2.853.065.325.642 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 2 kali, tanah longsor 1 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 1,748,525,642 dengan persentase 0 bencana daripada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat perbandingan bencana setiap tahunnya di kota pare-pare anggaran yang tidak relevan dengan jumlah bencana yang terjadi. Ini membuktikan bahwa diperlukannya pengevaluasian anggaran berdasarkan bencana yang terjadi, apakah anggaran dari tahun 2017 mengalami peningkatan atau penurunan sampai pada tahun 2021.

Grafik 4.23

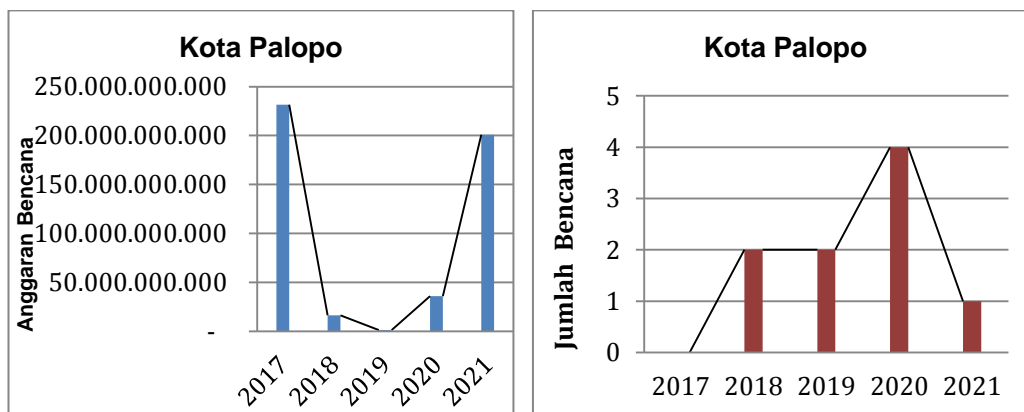


Dari Grafik 4.23 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kota Makassar diketahui sebanyak 6 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 12.224.623.175.649 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 2 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 2.444.924.635.130 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 1, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 120.000.000.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 2 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 9.180.269.886.000

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp12.224.623.175.649 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 5 kali, abrasi pantai 2 kali. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.180.269.886.000 dengan persentase 1 bencana daripada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat perbandingan bencana setiap tahunnya di kota Makassar anggaran yang tidak relevan dengan jumlah bencana yang terjadi. Ini membuktikan bahwa

diperlukannya pengevaluasian anggaran berdasarkan bencana yang terjadi, apakah anggaran dari tahun 2017 mengalami peningkatan atau penurunan sampai pada tahun 2021.

Grafik 4.24



Dari Grafik 4.24 membuktikan anggaran dan jumlah bencana di Kota Palopo diketahui sebanyak 9 bencana dengan total keseluruhan anggaran Rp 485.850.614.071 dan rata-rata bencana dari tahun 2017 sampai pada 2021 setiap tahun adalah 2 bencana sedangkan jumlah rata-rata anggarannya dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 97.170.122.814 dan jumlah bencana terendah dari tahun 2017-2021 adalah 0, sedangkan jumlah anggaran bencana terendah sebesar Rp 1.300.688.000 serta jumlah bencana tertinggi sebesar 4 sedangkan jumlah anggaran bencana tertinggi sebesar Rp 231.528.564.387

Berdasarkan data di atas diketahui jumlah anggaran dari tahun 2017-2021 sebesar Rp 485.850.614.071 dengan persentase bencana yang terjadi selama periode 5 tahun berturut-turut yaitu banjir 2 kali, tanah longsor 2 kali, kebakaran hutan dan lahan 1 kali. Dan diketahui menurun pada tahun 2021 sebesar Rp 200,889,786,000 dengan persentase 1 bencana daripada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat perbandingan bencana setiap tahunnya di kota Palopo anggaran yang tidak relevan dengan jumlah bencana yang terjadi. Ini membuktikan bahwa diperlukannya pengevaluasian anggaran berdasarkan bencana yang terjadi, apakah anggaran dari tahun 2017 mengalami peningkatan atau penurunan sampai pada tahun 2021.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan kajian berbagai literatur yang ada penghitungan kerugian akibat bencana alam belum memberikan hasil yang akurat. Dalam menentukan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan kerugian akibat bencana alam menyebutkan mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan biaya sebagai akibat bencana alam seakan kedua hal tersebut sama. Dari sisi ekonomi kedua hal tersebut berbeda.

Kerugian yang ditimbulkan oleh bencana pada prinsipnya terjadi karena kehancuran dari kekayaan ekonomi, aset fisik yang membantu menghasilkan pendapatan. Aset tersebut dapat meliputi jalan, jembatan, sarana umum, pabrik, tempat tinggal, bangunan, lahan pertanian, hutan atau sumber daya alam. Untuk menghitung kerugian tersebut harus menghitung pendapatan yang hilang dari aset tersebut, atau penurunan nilai aset. Sedangkan biaya akibat bencana muncul ketika kegiatan ekonomi dilakukan untuk mengganti, memperbaiki atau memperkuat aset-aset yang rusak karena bencana alam. Termasuk juga didalamnya adalah untuk memperkuat/mempersiapkan aset sebelum bencana alam terjadi.

Usaha pembangunan kembali biasanya menciptakan peningkatan penerimaan pajak bagi Negara yang berasal dari peningkatan penjualan barang-barang yang diperlukan untuk rehabilitas wilayah yang terdampak bencana. Bencana alam mendorong aktifitas ekonomi di wilayah terdampak menjadi semakin meningkat.

Tabel 4.2

Tabel isian grafik

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggaran	Jumlah Bencana	%
1	Kabupaten Bulukumba	Rp. 18.097.370.605	35	1,75%
2	Kabupaen Takalar	Rp. 18.389.821.788	40	2%
3	Kabupaten Gowa	Rp. 11.819.233.025	9	0,45%
4	Kabupaten Bantaeng	Rp. 3.716.282.619	6	0,3%
5	Kabupaten Enrekang	Rp. 2.013.844.000	21	1,05%
6	Kabupaten Jeneponto	Rp. 2.450.400.000	33	1,65%
7	Kabupan Selayar	Rp. 25.291.710.000	20	1%
8	Kabupaten sinjai	Rp. 4.886257.989	19	0,95%
9	Kabupaten Maros	Rp. 10.186.768.436	11	0,55%
10	Kabupaten Pangkajene	Rp. 31.173.919.726	26	1,3 %
11	Kabupaten Barru	Rp. 66.172. 651.231	28	1,4%
12	Kabupaten Bone	Rp. 11.431.870.721	18	0,9%
13	Kabupaten Soppeng	Rp. 25.515.163.808	24	1,2%
14	Kabupaten wajo	Rp. 14.398.450.000	61	3,05%
15	Kabupaten Sidrap	Rp. 37.306.346.480	48	2,4%
16	Kabupaten Pinrang	Rp. 10.382.328.600	31	1,55%
17	Kabupaten Luwu	Rp. 19.105.486.050	23	1,15%
18	Kabupaten Tana Toraja	Rp. 68.701.384.000	81	4,05%
19	Kabupten Toraja Utara	Rp. 20.608.485.000	54	2,7%
20	Kabupaten Luwu Utara	Rp. 631.211.776.000	44	2,2%
21	Kabupaten Luwu Timur	Rp. 8.862.545.905.155	19	0,95%
22	Kota Makassar	Rp. 12.224.623.175.649	6	0,3%

23	Kota Pare-Pare	Rp. 2.863.065.325.642	5	0,25%
24	Kota Palopo	Rp. 485.850.614.071	9	0.45%

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa kerugian akibat bencana alam belum akurat. Beberapa perhitungan yang dilakukan setelah beberapa bencana yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan banyaknya anggaran yang tidak sesuai dengan bencana yang terjadi, karena adanya bencana yang terjadi lebih tinggi dari pada anggaran yang dialokasikan lebih rendah.

Dari tabel 4.2 selama periode 5 tahun bencana tertinggi mencapai 4,05% sedangkan anggaran yang dialokasikan hanya 68% untuk kegiatan yang terkait langsung dengan bencana alam. Sedangkan bencana terendah yang mencapai 0,45% dengan alokasi dana yang lebih tinggi di bandingkan dengan kabupaten yang mengalami lebih banyak bencana. Kondisi ini mencerminkan alokasi anggaran bencana belum sepenuhnya berfokus pada performance untuk mengatasi bencana, karena anggaran yang belum sepenuhnya dialokasikan untuk bencana yang tidak terlalu beresiko masih relatif tinggi.

Dapat disimpulkan Alokasi anggaran bencana alam di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Pendekatan penganggaran terutama unified budgeting dan performance base budgeting tidak dapat dilakukan dengan baik, sehingga pengukuran badan yang menangani bencana alam juga sangat sulit dilakukan. Selain itu dari sisi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bencana di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat terbatas dan jauh dari kebutuhan. Tumpang

tindih anggaran, biaya koordinasi, biaya penyusunan peraturan dan rekomendasi titik lemah dalam penganggaran bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa analisis anggaran bencana yang dilakukan peningkatan jumlah anggaran yang signifikan pada tahun 2021 yang sangat mempengaruhi keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dilihat dari total keseluruhan bencana se Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017-2021 adalah sebanyak 651 sedangkan jumlah seluruh anggaran se Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp 24,109,673,699,709.

Dapat disimpulkan Alokasi anggaran bencana alam di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Pendekatan penganggaran terutama unified budgeting dan performance base budgeting tidak dapat dilakukan dengan baik, sehingga pengukuran badan yang menangani bencana alam juga sangat sulit dilakukan. Selain itu dari sisi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bencana di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat terbatas dan jauh dari kebutuhan. Tumpang tindih anggaran, biaya koordinasi, biaya penyusunan peraturan dan rekomendasi titik lemah dalam penganggaran bencana di Provinsi Sulawesi Selatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1. Didasarkan pada penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama dengan metode yang sama tapi unit analisis yang berbeda agar

dapat diperoleh suatu kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum

2. Perlunya pengevaluasian anggaran dan jumlah bencana yang terjadi agar efektivitas anggaran pemerintah dalam realisasi anggaran bencana dapat mencapai tujuan anggaran yang sesuai dengan rentan bencana yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung (2006:81) “Akuntansi Pemerintah Daerah”
- Adams, C.A. dan Frost, G.R. (2006), “Aksesibilitas dan fungsionalitas situs web perusahaan: implikasi untuk pelaporan keberlanjutan”, Strategi Bisnis dan Lingkungan
- ANGGITA CITRA S R, Faiz Zamzami, S.E., M. Acc., QIA., CMA Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Australian Department of Environment and Heritage. Triple Bottom Line Reporting in Australia – A Guide to Reporting Against Environmental Indicators 2003
- Australia Government Department of Environment and heritage. (2005). The state of sustainability reporting in Australia 2005. [Diakses 10 juni 2022]. Available from <http://www.deh.gov.au/settlements/industry/finance/publications/indicators>
- Barbara Lynch (2009) An examination of environmental reporting by Australian state government departments
- Che Ku Hisan, Surya Ahmad, Noor Emilina Mohd Nasir, (2019) Environmental reporting by the Malaysian local governments Meditari Accountancy Research 27 (4), 633-651, 2019
- Edy (2016; 66) metode populasi dan sampel
- Geoffrey R Frost, Michael Seamer (2002) Adoption of environmental reporting and management practices: an analysis of New South Wales public sector entities
- <http://ditjenppi.menlhk.go.id/admin/berita-admin/obrolan/3040-sulawesi-selatan.html> [diakses 15 juni 2022]
- <https://ruangmenyala.com/article/read/pengertian-apbd-fungsi-dasar-hukum-dan-langkahpenyusunan#:~:text=Funcsi%20APBD&text=Funcsi%20perencan aan%3A%20APBD%20sebagai%20acuan,sesuai%20dengan%20kebijak an%20yang%20ditentukan> [diakses 15 juni 2022].
- <https://theconversation.com/empat-tantangan-pemerintah-daerah-dalam-menjalankan-program-lingkungan-dan-pengendalian-perubahan-iklim-172852> [diakses 2 agustus 2022]
- Mardiasmo (2009:67), Akuntansi Sektor Publik Anggaran pemerintah

Noor Cholis Majid (2018) analisis anggaran bencana alam

Suriadi, A. B. et al., 2013. Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat
Bencana. Peraturan BNPB.

Sutiyono (2017;8) metodologi penelitian kuantitatif Viandita (013:116)
metodologi penelitian kuantitatif

V. Wiratha sujarweni (2014:39) metodologi penelitian kuantitatif